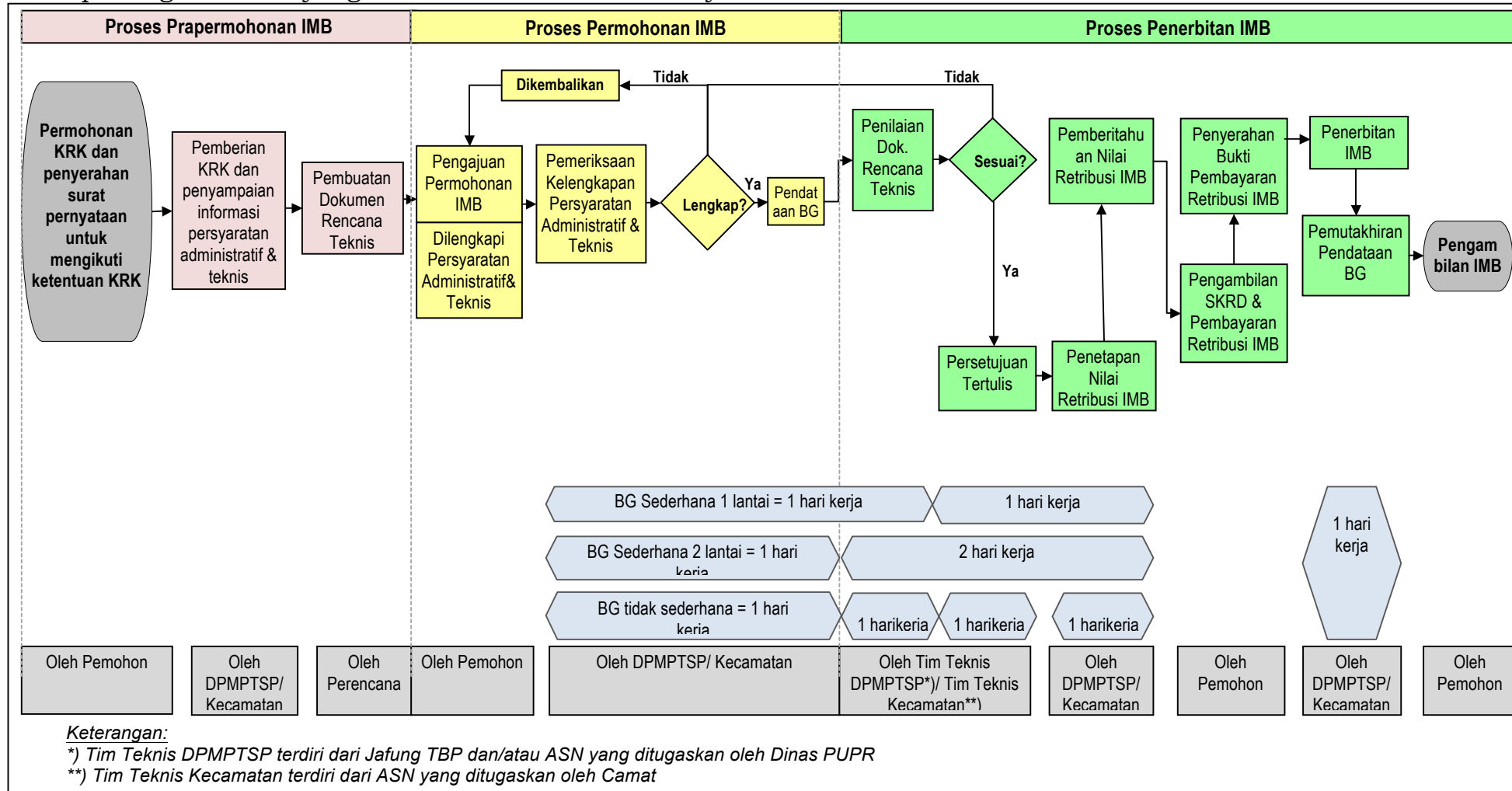
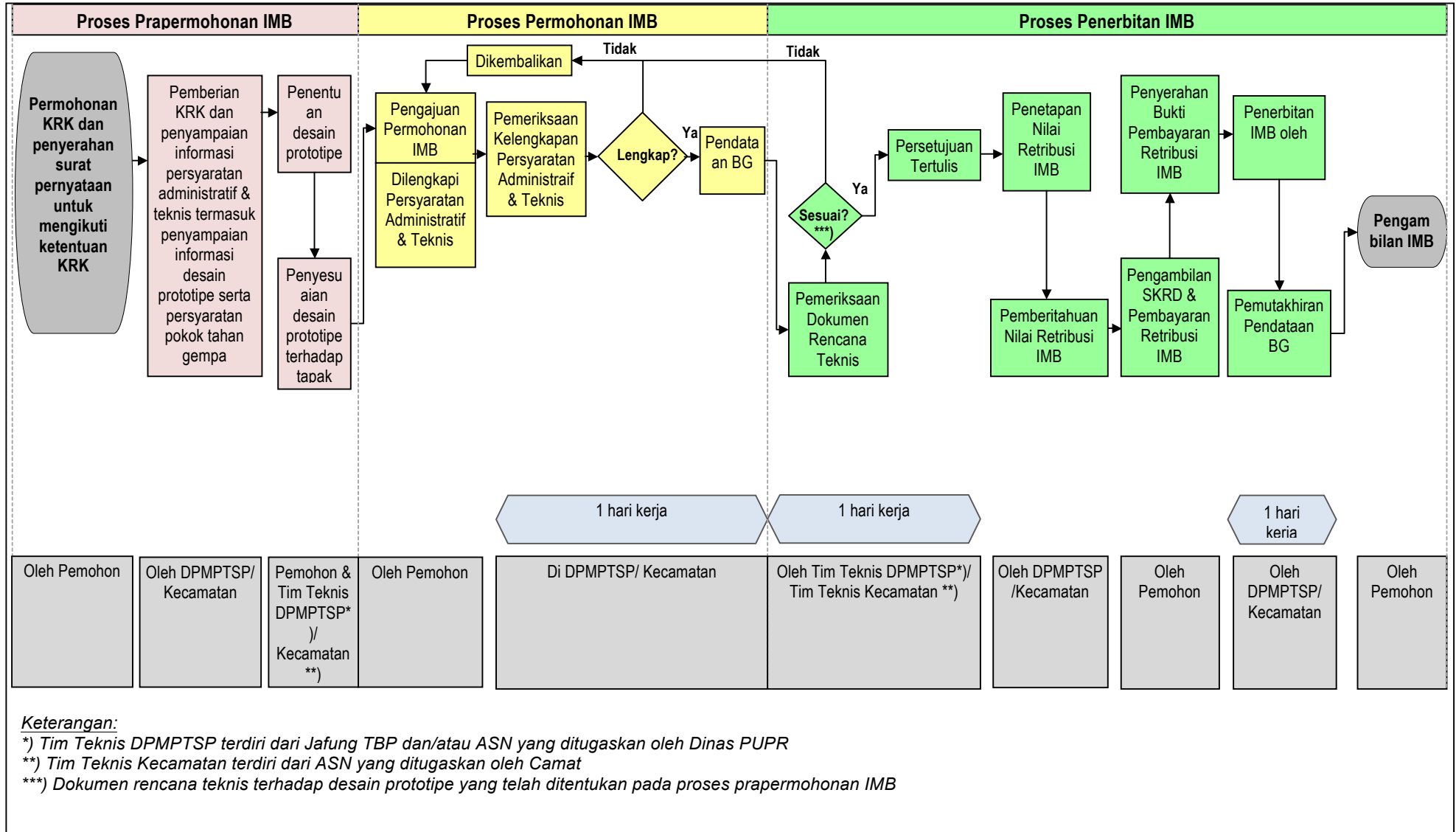


6. Bagan Tata Cara Penyelenggaraan IMB

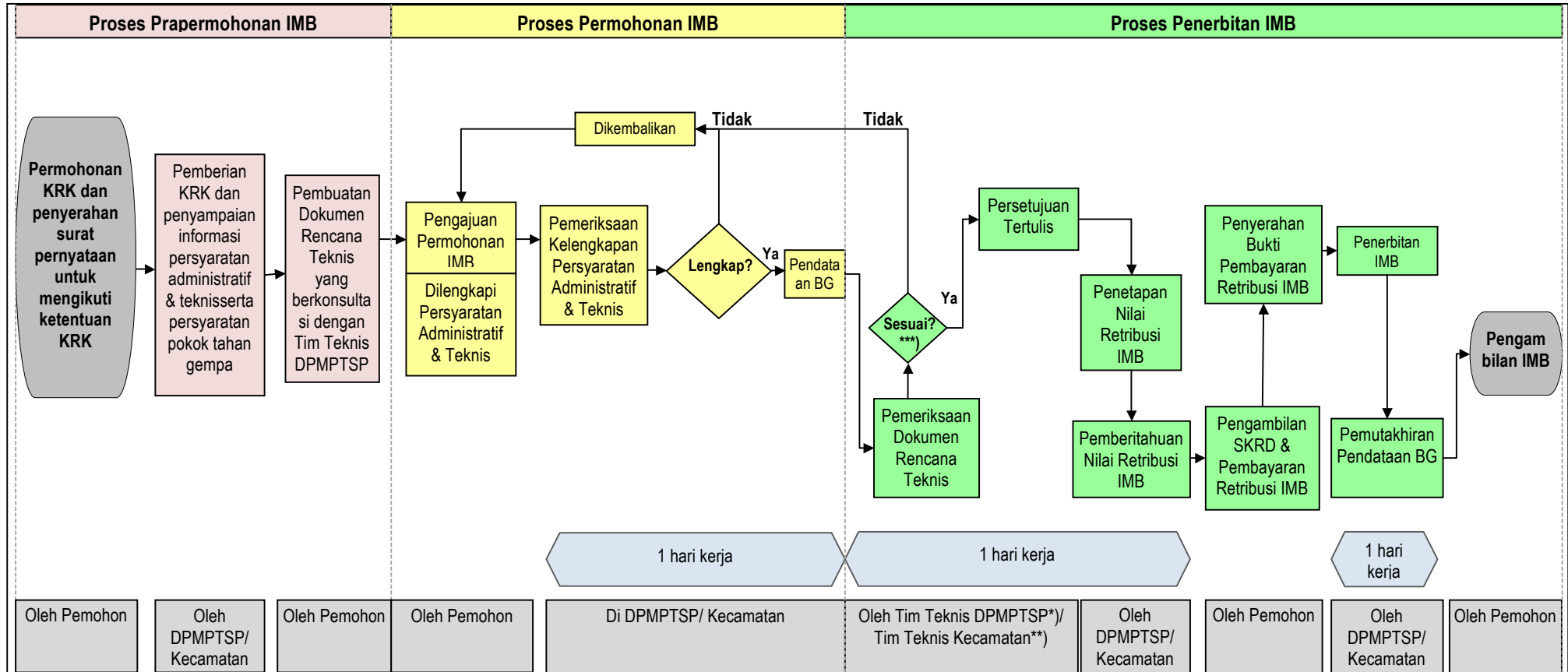
A. Bagan Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Sederhana dan Tidak Sederhana Bukan untuk Kepentingan Umum yang Dokumen Rencana Teknisnya Dibuat oleh Perencana Konstruksi



B. Bagan Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Sederhana Bukan untuk Kepentingan Umum yang Dokumen Rencana Teknisnya Menggunakan Desain Prototipe



C. Bagan Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) Lantai Bukan untuk Kepentingan Umum yang Dokumen Rencana Teknisnya Dibuat Sendiri oleh Pemohon



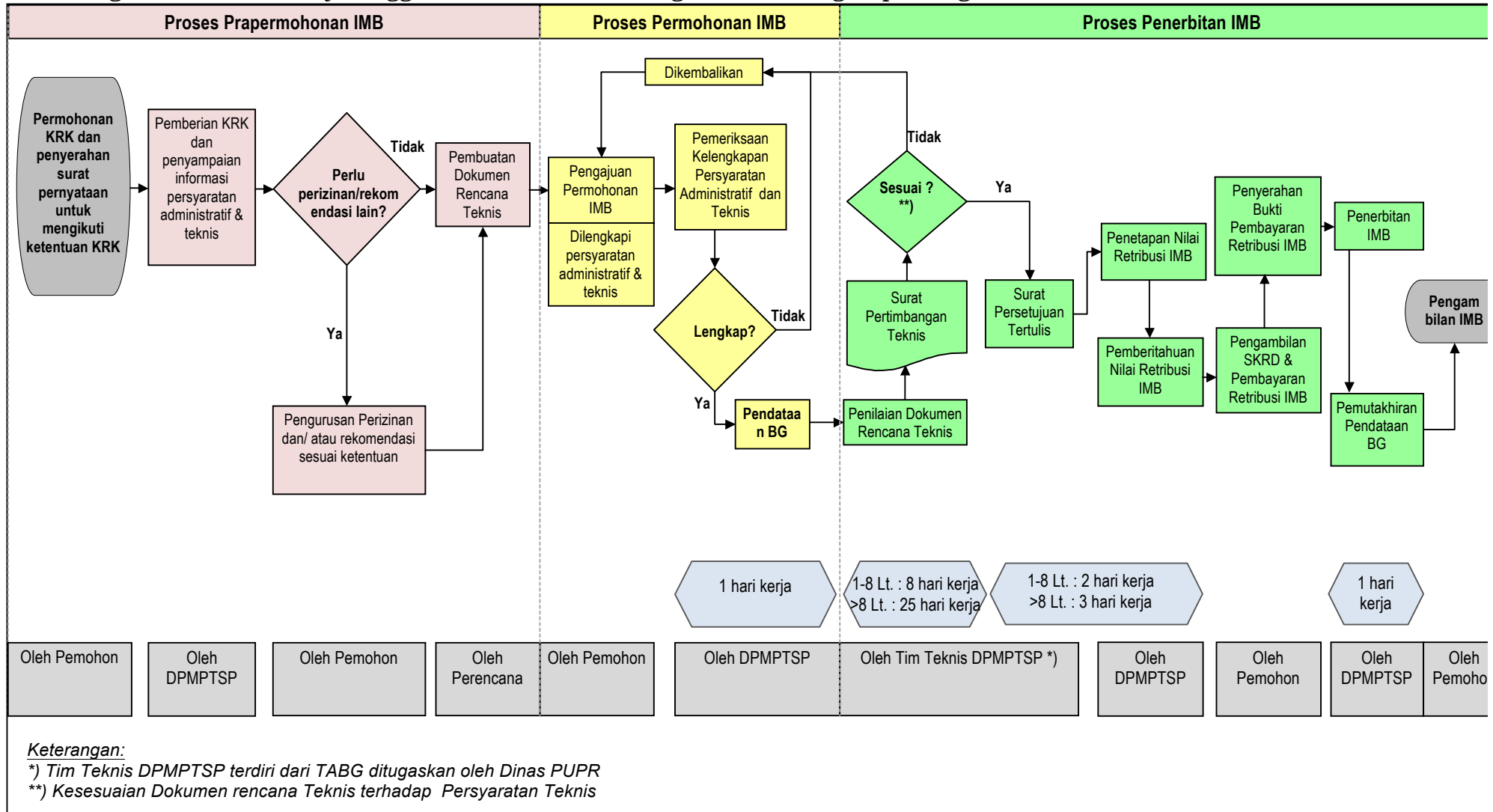
Keterangan:

*) Tim Teknis DPMPTSP terdiri dari Jafung TBP dan/atau ASN yang ditugaskan oleh Dinas PUPR

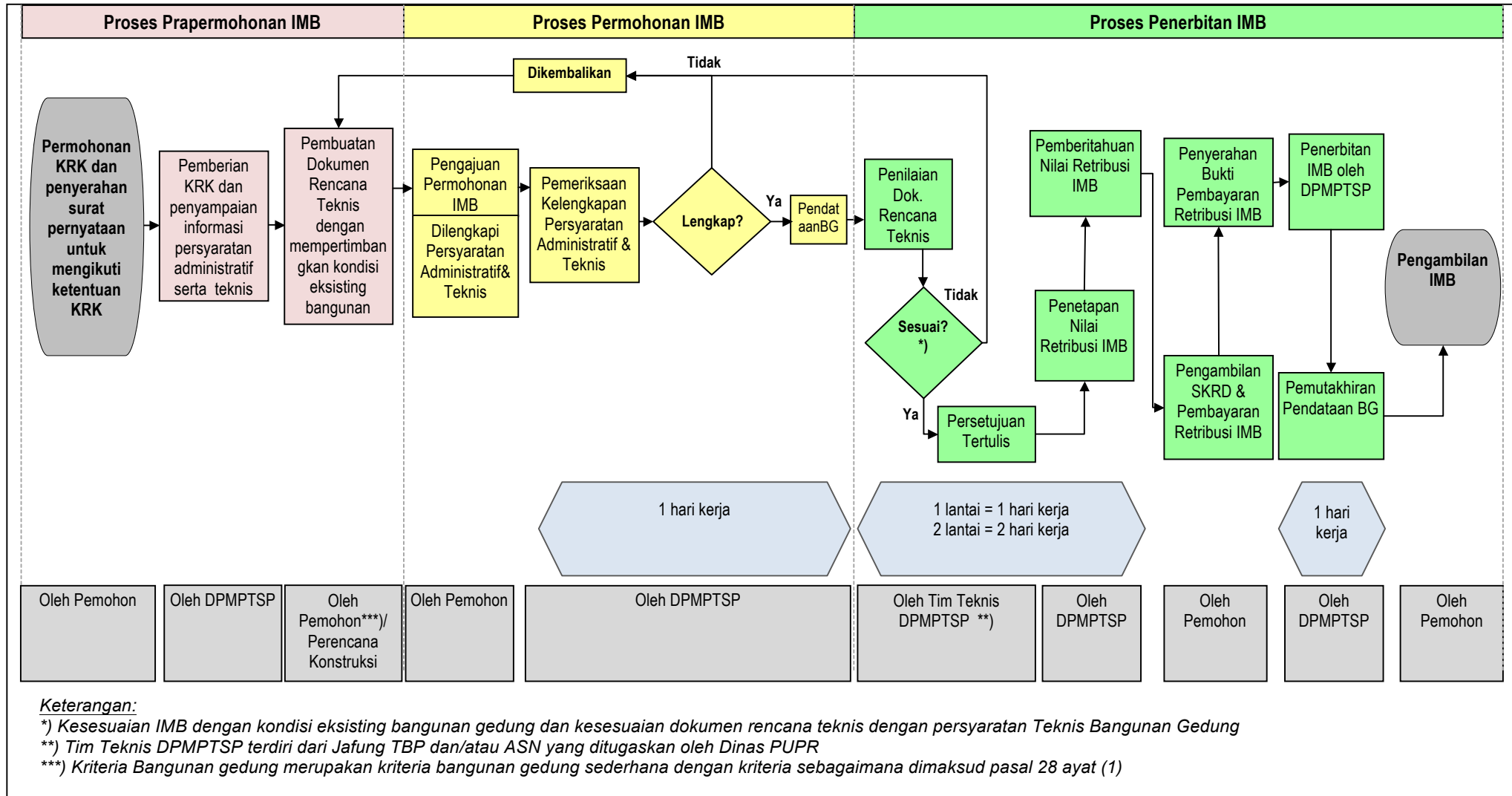
***) Tim Teknis Kecamatan terdiri dari ASN yang ditugaskan oleh Camat

****) Kesesuaian dokumen rencana teknis terhadap dokumen rencana teknis hasil konsultasi dengan Tim Teknis DPMPTSP pada proses prapermohonanIMB

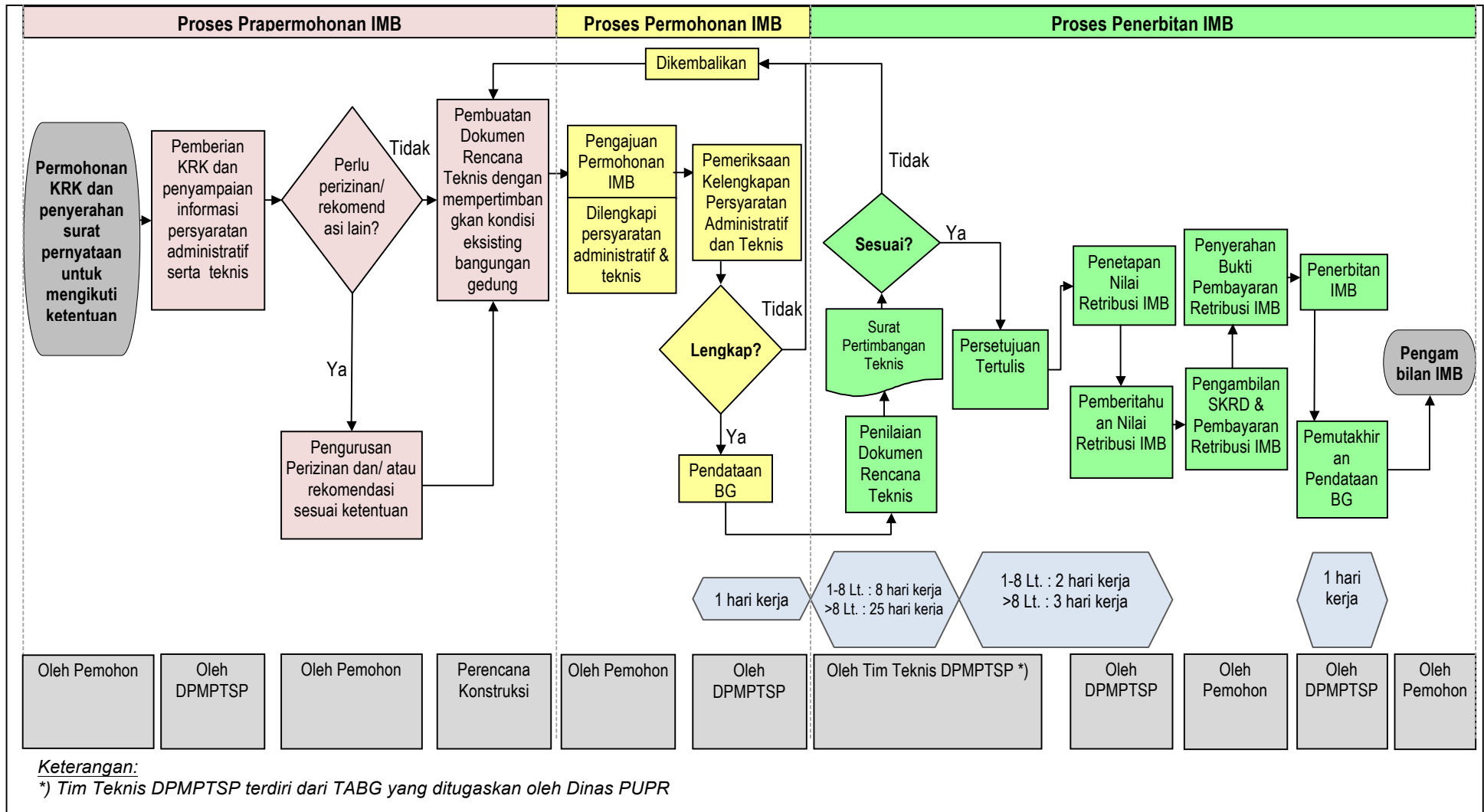
D. Bagan Tata Cara Penyelenggaraan IMB untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum



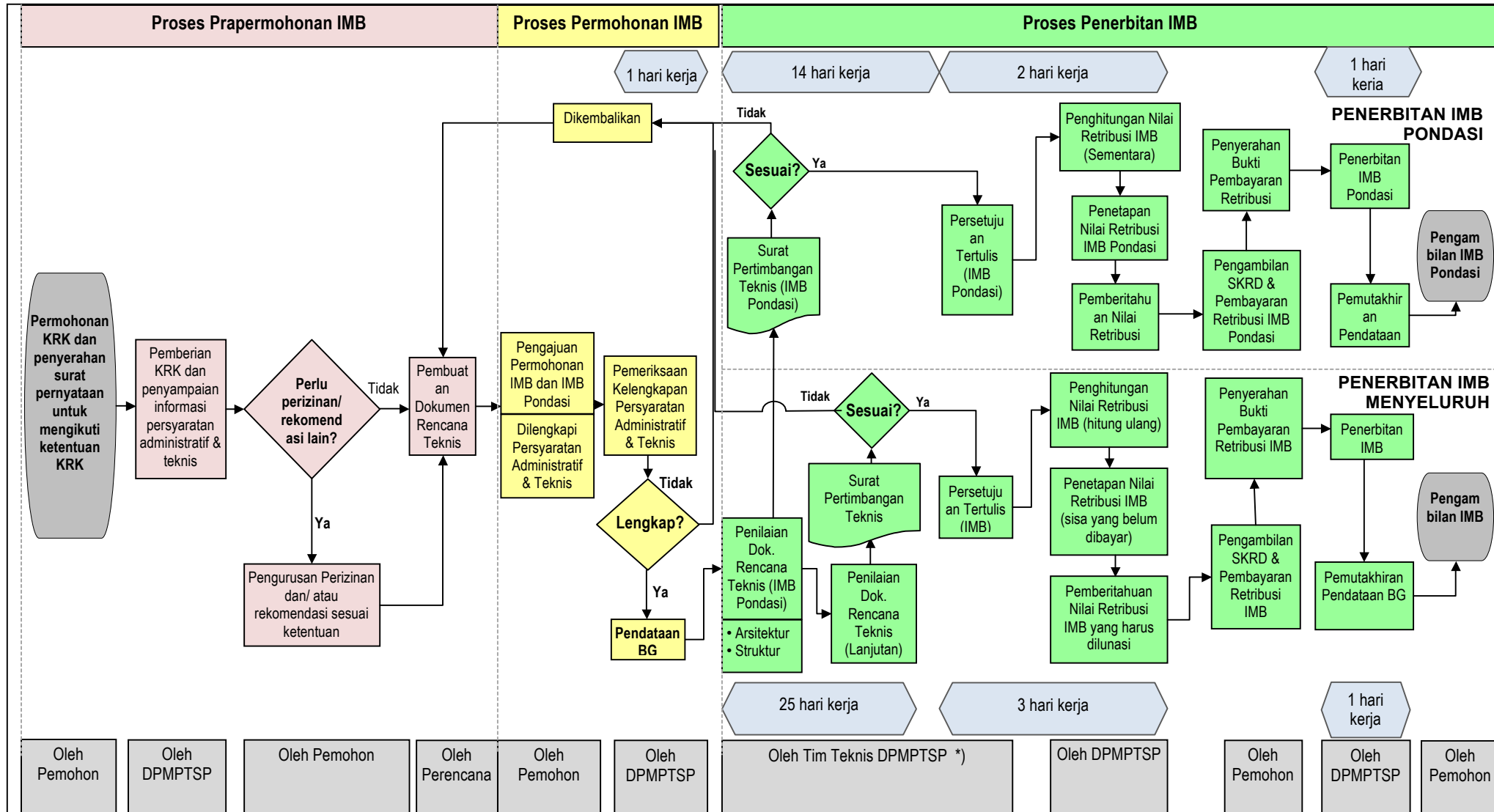
F. Bagan Tata Cara Penyelenggaraan IMB untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung Bukan untuk Kepentingan Umum



G. Bagan Tata Cara Penyelenggaraan IMB untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum.



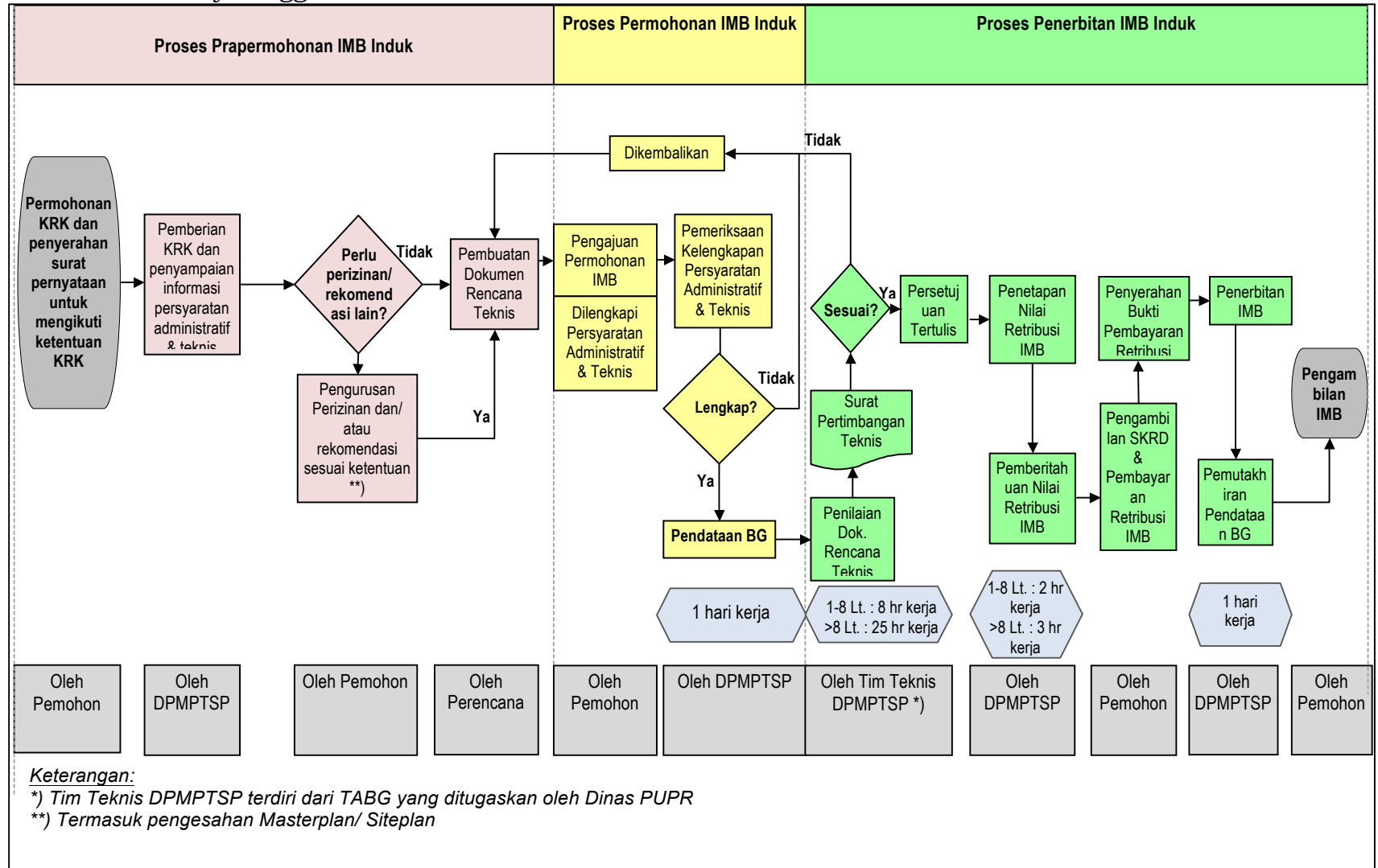
H. Bagan Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bertahap



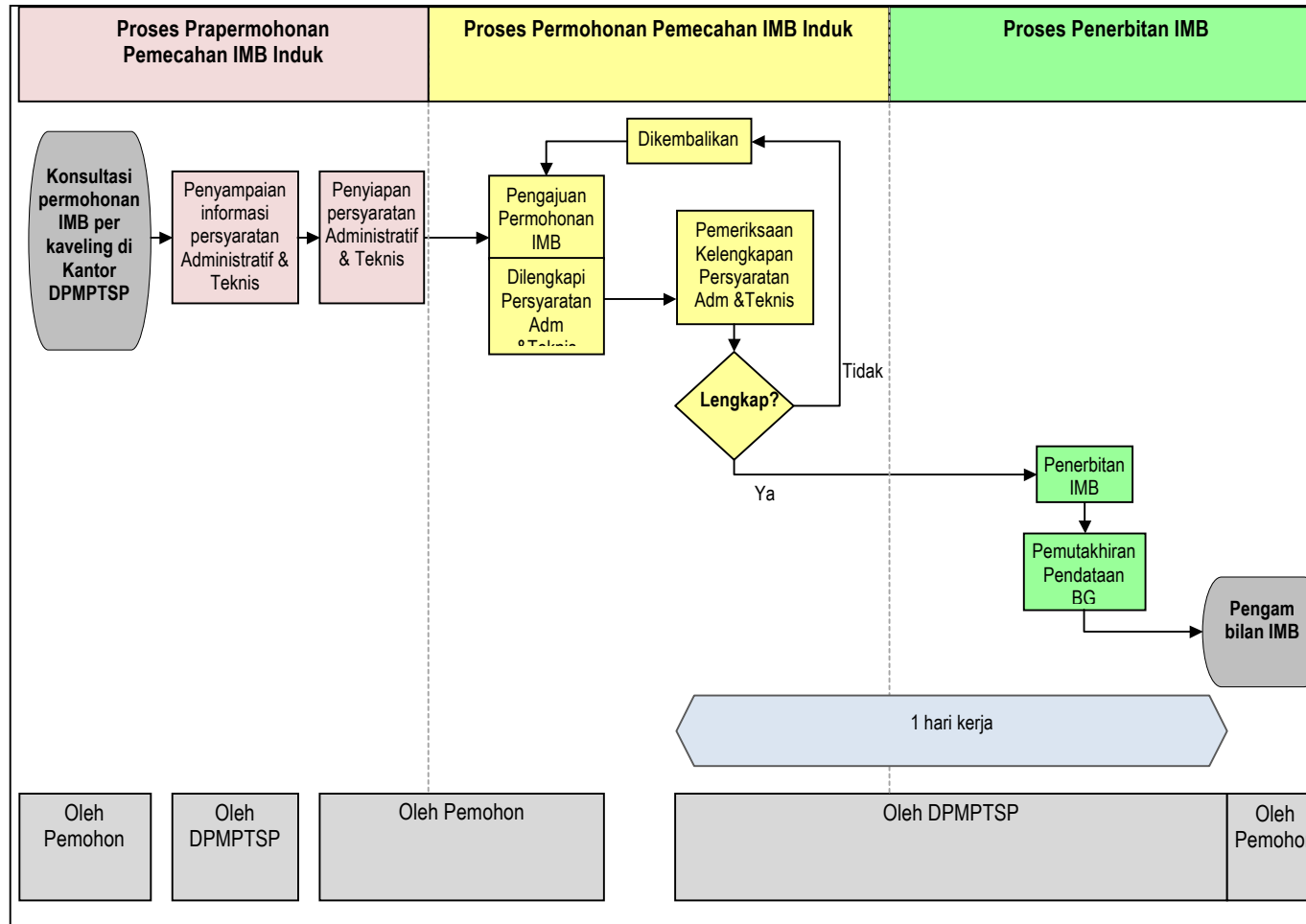
Keterangan:

*) Tim Teknis DPMPPTSP terdiri dari TABG yang ditugaskan oleh Dinas PUPR

I. Bagan Tata Cara Penyelenggaraan IMB untuk Bangunan Gedung yang Dibangun Kolektif
 a. Bagan Tata Cara Penyelenggaraan IMB Induk



b. Bagan Tata Cara Pemecahan IMB Induk



K. Bagan

Tata

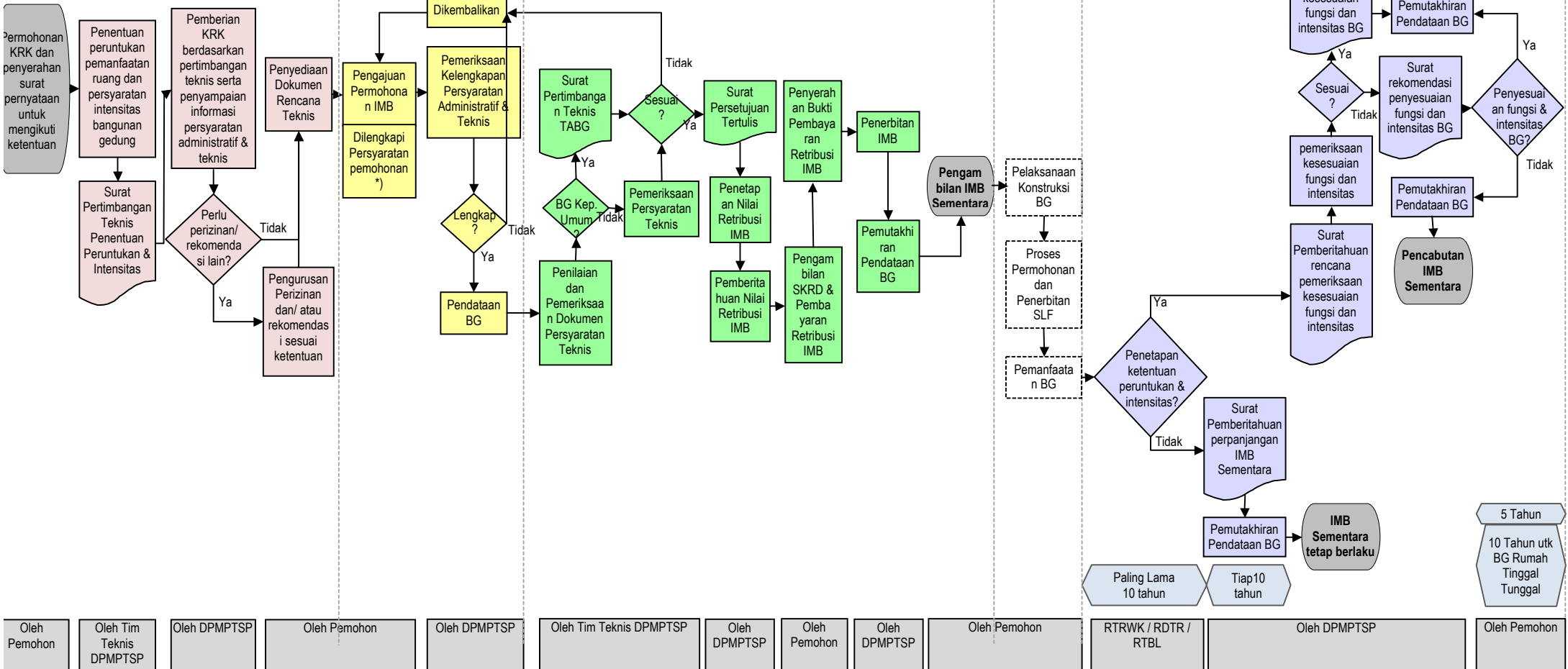
Cara

Proses Prapermohonan IMB

Proses Permohonan

Proses Penerbitan IMB

Proses Evaluasi IMB Sementara



Keterangan:
 *) Tim Teknis DPMPPTSP terdiri dari TABG yang ditugaskan oleh Dinas PUPR
 **) Kesesuaian fungsi bangunan gedung yang ditetapkan terhadap fungsi bangunan gedung yang ada dalam IMB sementara
 ***) Akibat perubahan peruntukan lokasi pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan